

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB BANJARBARU
TAHUN 2023



icare

e|gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEKAAN



ALWAYS THE BEST

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas. Berfungsi, sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Namun hal tersebut menjadi cambuk bagi kami semua untuk lebih baik di masa depan.



**Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Banjarbaru**

Wayan Nurasta Wibawa, Amd.IP., S.H., M.H.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2023. Nantinya LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan satuan kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Batam, Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIB Sawah Lunto, Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Rumbai. Kemudian ditingkatkan Kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 – tahun 2018 Tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian besar dan tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara umum pelaksanaan program kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru selama Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, namun demikian harus kami akui masih terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya yaitu

antara lain Tingkat Pemahaman Sumber Daya Manusia yang masih kurang serta sarana dan prasarana di dalam Lapas yang belum dapat di optimalkan.

Adapun Capaian Kinerja Lapas Kelas IIB Banjarbaru Pada Tahun 2023 yaitu Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Realisasi Belanja instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.774.077.935 atau sekitar (98,57%) dari anggaran belanja sebesar Rp23.104.302.000.

Guna peningkatan capaian kinerja dibidang pada tahun mendatang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru akan mengupayakan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan melengkapi sarana dan prasarana dalam Lapas yang kurang.



Daftar Isi

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- a. Latar belakang
- b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Aspek Strategis
- e. Isu Strategis
- f. Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Anggaran
- d. Capaian Kinerja Lainnya

Bab IV Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Lampiran



"Lapas Banjarbaru adalah milik kita bersama.

Laksanakan target kinerja yang sudah kita sepakati bersama.

Dengan motto baru yaitu "TANGGUH" yang merupakan akronim dari "Transparan, Tanggung Jawab, Gigih, Unggul, Harmonis" diharapkan menjadi sebuah kekuatan baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai Petugas Pemasyarakatan.

Tingkatkan pemahaman Tata Nilai "PASTI", bekerja dengan core value ASN "BerAKHLAK" maka apa yang kita lakukan akan selalu berada di jalan yang benar.

Tingkatkan sinergitas dengan instansi lainnya yang memiliki hubungan dengan kita dan juga masyarakat."

I Wayan Nurasta Wibawa **Kepala Lapas Kelas IIB Banjarbaru**



Bab I

Pendahuluan

a. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru merupakan satuan kerja vertikal yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Batam, Lembaga Pemasyarakatan narkotika Kelas IIB Sawah Lunto, Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Rumbai. Kemudian ditingkatkan Kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 – tahun 2018 Tentang Peningkatan Kelas Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian besar dan tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Tak kalah pentingnya ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru juga mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia yang harus mewujudkan hukum sebagai Panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarganya.

b. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru mempunyai Tugas dan fungsi yaitu :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/Anak Didik	Melakukan pembinaan narapidana/Anak Didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/Anak Didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dibagi menjadi 4 Bagian, yaitu :

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
1. Sub Bagian Tata Usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
1.1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan	melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
1.2. Urusan Umum	melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/Anak Didik dan Bimbingan Kerja
2.1. Sub seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan	melakukan tugas pencatatan, membuat statistic, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/Anak Didik



2.2. Sub seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik	mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
2.3. Sub Seksi Kegiatan Kerja	memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja
3. Seksi administrasi Keamanan dan Tata Tertib	mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusu laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib
3.1. Sub Seksi Keamanan	mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
3.2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib	menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib
4. Kesatuan Pengamanan Lapas	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik; - Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; - Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik; - Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; - Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan



Daftar nama pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

No	NIP	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	19800405 200012 1 001	I WAYAN NURASTA WIBAWA, A.Md.IP., S.Sos., M.Si.	KEPALA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
2	19890919 200901 1 001	SEPTYAWAN KUSPRIYO PRATOMO, Amd.IP., S.AP., M.M.	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
3	19670413 199403 1 003	TAMBERIN	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
4	19930126 201608 1 001	BAGUS PARAS ETIKA, A.Md.P., S.AP., M.H	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
5	19840205 200801 1 001	SABAR ANJU PADANG, S.H.	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
6	19800916 200112 1 001	AMAN TUBILLAH	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
7	19790424 200703 1 001	HERRY AGENG SUDARNO YOGHO, S.AP	KEPALA URUSAN UMUM LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
8	19930618 201608 1 001	YUSUF ARIFANDI, A.Md.P., S.H.	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
9	19830718 200604 1 001	DEDY SAFITRI, S.H.	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NAPI/ANAK DIDIK LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
10	19880607 200801 1 001	ADY TRI MARWOKO, S.H.	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
11	19700628 199403 1 001	SAHRI MULYANTO	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



12	19850111 201012 1 002	TRI ANDI WIDIARTO, S.H., MA	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
13	19721218 200112 1 001	AHMAD SUHAIMI, SE	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
14	19720514 200112 1 001	SALIMUDDIN	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
15	19700721 200210 1 001	SHALAHUDDIN	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
16	19910606 201212 1 001	DWIMAS GADING ENDARYANTO, S.H.	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
17	19820603 200703 1 001	DANI IRAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
18	19840617 200801 1 001	AGUNG DWI KURNIAWAN	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN /KEIMIGRASIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
19	19850813 200801 1 002	FAISAL AKBAR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
20	19860107 200801 1 001	MUHAMMAD FADLI YANNUR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
21	19910107 201012 1 001	BINSAR PANDAPOTAN SIDADOLOG	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
22	19890217 201212 1 002	M. FAHRIAN RIYADI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
23	19891002 201712 1 006	ABDURRAHMAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
24	19900206 201712 1 006	RAIES FAEDANIE	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
25	19900209 201712 1 002	GT. MUHAMMAD AJIE MUKMIN RAHMATULLAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
26	19900424 201712 1 001	HAFIZAR HANAFI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
27	19900614 201712 1 002	NOORHIDAYAT	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
28	19900814 201712 2 002	NIDYA PRASTIWI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



29	19900920 201712 1 001	MISRANNUDIN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
30	19901023 201712 1 003	ALFIAN NOOR	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
31	19910103 201712 1 004	ADRIAN HADI GUNA MULYA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
32	19910201 201712 1 002	RAHMAT SAFA`AT	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
33	19910411 201712 1 002	MARYADI SETIAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
34	19910510 201712 1 004	MUHAMMAD FITRIYADI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
35	19910607 201712 1 001	ARIYADI WIJAYANTO	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
36	19910612 201712 1 004	ADIANOR HIDAYATULLAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
37	19910624 201712 1 001	HERI AKBAR SURYA NANDA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
38	19910717 201712 1 005	NIZAR ZULMI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
39	19911117 201712 1 003	WAHYU INDRA WARDANA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
40	19911124 201712 1 002	HENDRA NOVIANSYAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
41	19920702 201712 1 005	AFRAHANI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
42	19921008 201712 1 003	HAMDANI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
43	19921113 201712 1 005	KHALID FADULLAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
44	19921124 201712 1 001	ANDIKA NOVRIZAL	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
45	19921201 201712 1 002	BOYKE RELLA ABIMANYU	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
46	19930102 201712 1 003	ALI AKBAR SUPRAYOGI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



icare

e.gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEKAAN



ALWAYS THE BEST

47	19930624 201712 1 003	DENNY BIMANTARA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
48	19931217 201712 1 005	DEDY SETIYAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
49	19940418 201712 1 003	MUHAMMAD IQBAL ERLANGGA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
50	19941021 201712 1 002	MUHAMMAD JUNAIDI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
51	19941028 201712 1 001	MUHAMMAD RIFA'I	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
52	19950623 201712 1 005	DARU DWI UTOMO	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
53	19951027 201712 1 001	MASTURI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
54	19951111 201712 1 002	MUHAMMAD NOOR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
55	19960112 201712 1 006	M. ZAINUL IRPANSYAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
56	19960406 201712 1 001	MUHAMMAD HENDRA PRIBADI	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
57	19960524 201712 1 001	FAJAR TRIANTO	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
58	19960703 201712 1 005	AKH. ANSARI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
59	19960719 201712 1 004	RIZKI SURYA DHARMA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
60	19960930 201712 1 003	ADIE SURYA SEPTIAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
61	19920205 201712 1 003	BAGUS SATRIA FEBRIANUR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
62	19931028 201712 1 001	TRIDA SETIAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
63	19961119 201712 2 001	LINTANG RETTY DEWI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
64	19970326 201712 1 001	ARIYANTO	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



icare

e.gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning



ALWAYS THE BEST

65	19970412 201712 1 003	ERWIN TRI HATMAJA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
66	19970528 201712 1 003	DIKA AL ARIF	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
67	19970624 201712 1 003	MUHAMMAD KEMAL LAUDE	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
68	19971108 201712 2 003	SHINTA JELITA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
69	19980105 201712 1 004	PRIYANDY DEWANDONO	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
70	19980122 201712 1 004	RIZKI MARDHI ALWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
71	19980328 201712 1 004	KHATAMI MUHAMMAD	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
72	19980501 201712 1 001	AMIN MUZAKIR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
73	19980520 201712 1 001	MUHAMMAD HELMI BADRUL	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
74	19980813 201712 1 004	MUHAMMAD FATHUR RACHMAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
75	19981129 201712 1 001	MUHAMMAD PANDU FADLILLAH ARTHA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
76	19990314 201712 2 001	HURUL AIN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
77	19990414 201712 1 006	RASYID PHARI KAYUNA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
78	19990426 201712 1 002	ASHADI EKO KURNIYAWAN	PENGAMAN PEMASYARAKATAN PEMULA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
79	19990428 201712 1 004	MUHAMMAD RIFKY	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
80	19990520 201712 1 001	MUHAMMAD BANGKIT SATRYAWAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
81	19830808 201012 1 002	MUHAMMAD HERIYADI	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
82	19891230 201101 2 004	DESSY MERRYANA SAGALA, A.Md.Keb.	PENGELOLA KEUANGAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



83	19900630 201712 1 003	FERMADY	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
84	19910522 201712 1 001	MUHAMMAD FAUZI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
85	19920707 201212 1 001	MUHAMMAD DICKY SUBAGJA	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
86	19920925 202012 1 001	AHMAD AFFAN HERNADI	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
87	19931015 201712 1 001	HASAN MUBAROK	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
88	19951003 202012 1 001	ALDY REZA SAPUTRA	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
89	19960101 201712 1 007	ABDULLAH ISLAMI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
90	19960809 202012 1 001	MUHAMMAD HAMIDI	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
91	19970213 202012 1 002	MUHAMAD FEBRIANOR	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
92	19970423 202012 1 002	MUHAMMAD NOR IKHSAN	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
93	19980311 201712 1 001	AL LAIL QODAR	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
94	19980401 201712 1 002	IBRAHIM HASAN	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
95	19980601 201712 1 002	HARRY ANDANI	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
96	19990324 202012 1 001	KHASBI NASRULLOH FIRDAUS	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
97	19990714 202012 1 002	MUHAMMAD GIBRAN	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
98	19990725 201712 2 001	INGGIT FITRIA YOLASARI ROHMAH	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
99	20000714 202012 1 001	RAHMANI NOOR	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
100	20010828 202012 1 001	TEGAR PRAMUDYA	PENJAGA TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU



icare

e.gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning



ALWAYS THE BEST

101	19831017 200801 1 001	MUHAMMAD ZULKARNAEN FAHLEVI	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
102	19891221 201503 2 002	TERA ROSILAWATI, AM.Keb.	PENGELOLA SISTIM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
103	19900307 201212 1 002	ARBY PRATAMA DIKJAYA, S.H.	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
104	19901208 201012 1 001	ARIE IMAM CAHYADI	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
105	19910203 201212 1 001	WAHYU SUMA ISTIAWAN, S.H	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
106	19910210 201503 1 004	ERWAN PEBRI PURNOMO, A.Md.Kep.	PENGOLAH DATA KESEHATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
107	19910730 201503 2 005	ERWIN PRATIWI PUTRI, AM.Keb.	PENGELOLA SISTIM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
108	19910912 201503 1 002	SETIADI KURNIAWAN, A.Md.	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
109	19911021 201503 1 001	RAKHMAN ARIF, A.Md.	PENGELOLA SISTIM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
110	19921128 201503 2 005	TRI RAHAYU PUTRI, A.Md.Kep.	PENGELOLA SISTIM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
111	19921220 201212 1 001	MUHAMMAD WAN NOOR, S.H.	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
112	19930622 201503 1 001	AHMAD SYAFIQ HALWAN, S.Kom	PENGELOLA SISTIM DATABASE PEMASYARAKATAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
113	19930728 201212 1 001	MUHAMMAD RIZA JULIPARIN, S.H.	PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN PERTAMA	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
114	19940630 201712 1 008	M. FAISAL ANSHORI	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU
115	19951219 202203 1 002	FAHRUL ROZI, A.Md.Kep	PELAKSANA/TERAMPIL - PERAWAT	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

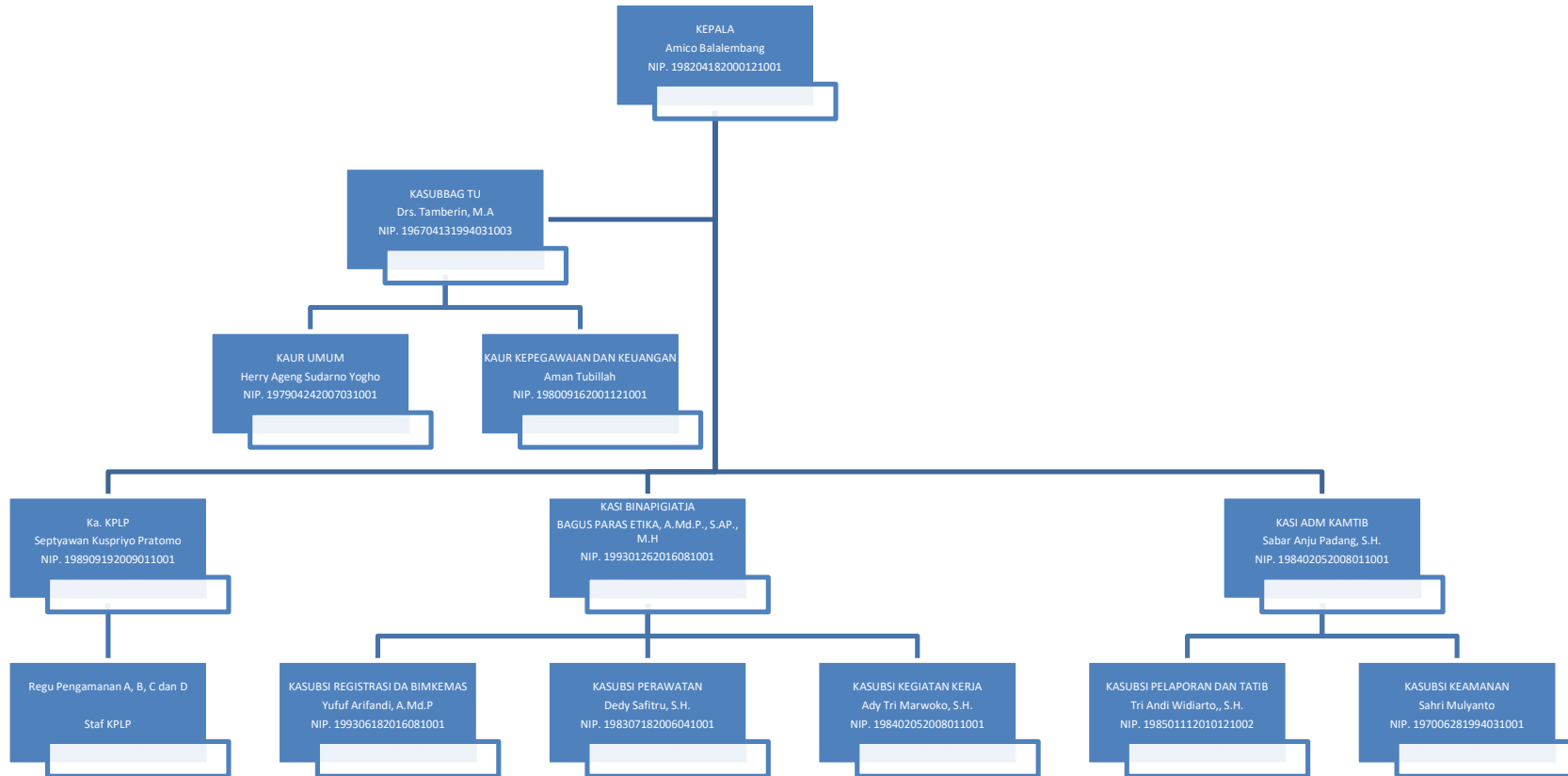


Sebaran rincian jabatan struktural dan fungsional di Lapas Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

NO	KAPASITAS	ISI RATA-RATA	PEGAWAI											JUMLAH PEGAWAI
			PEJABAT STRUKTURAL	PETUGAS KEAMANAN	PEMBINAAN	ADMINISTRASI	PEMBIMBING		JABATAN FUNGSIONAL			JUMLAH		
							PK	PEMBANTU PK	DOKTER	PERAWAT	LAINNYA	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	798	1979	11	71	23	9	-	-	-	1	-	106	9	115
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
JUMLAH														



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJARBARU



c. Maksud dan Tujuan

- ✓ Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru kepada pihak-pihak yang memberi amanah/mandat;
- ✓ Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
- ✓ Sebagai wujud keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM.

d. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru memiliki aspek strategis penting dalam peran sertanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta ini antara lain yaitu :

- ✓ berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- ✓ Untuk Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- ✓ Untuk Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional

e. Isu strategis

Adapun Isu strategis yang menjadikan pentingnya peran organisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Lapas Kelas IIB Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- ✓ Pemahaman pegawai yang belum optimal terhadap Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan pekerjaannya;
- ✓ Tenaga medis yang masih kurang baik dokter ataupun perawat yang merupakan pegawai tetap;
- ✓ Masih terjadinya over crowded yang bisa dilihat dari kapasitas yang hanya 798 orang namun diisi untuk 1965 orang Warga Binaan Pemasyarakatan;

- ✓ Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang laporan keuangan
- ✓ Masih kurangnya tenaga pengamanan

f. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran /target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun Sistematika dari penyusunan Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP) di Lapas Kelas IIB Banjarbaru adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023.



BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun 2023 serta upaya dan strategi meningkatkan capaian kinerja Tahun 2024.

Bab II

Perencanaan Kinerja

a. Rencana Strategis

➤ Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah making delivered, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;



8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**



➤ Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggung jawab memberikan layanan publik dibidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik dibidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan Negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia. Layanan dibidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dinegeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga Negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:



- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan



politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke-V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian

isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).

- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression)

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasaryakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.

6. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi keenam ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan

akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;

- d. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

7. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi ketujuh ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun

tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di Luar Negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

➤ Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,**



dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk **terlindunginya hak asasi manusia.**
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk **menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk **mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

➤ **Sasaran strategis**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan yaitu sebagai berikut :



- Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- Terselenggaranya penegakan hukum di Pemasyarakatan yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI.

➤ Tata Nilai



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020- 2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback

yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ **Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru**

I. Indikator Kinerja Utama

A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

- Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah;
2. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat;
3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya;
4. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga;
5. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;
6. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
7. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;
8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
9. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;
10. Persentase tahanan/narapida/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
11. Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;
12. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;
13. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
14. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
15. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;
16. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan



- menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
17. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
 18. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;
 19. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;
 20. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;
 21. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;
 22. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;
 23. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
 24. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;
 25. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;
 26. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;
 27. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
 28. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;
 29. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
 30. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;
 31. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
 32. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
 33. Pembinaan kepribadian dan layanan integrasi narapidana
 34. Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan
 35. Pembinaan kemandirian narapidana
 36. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial



37. Layanan keamanan dan ketertiban

B. Program dukungan Manajemen

a. Sasaran Kegiatan

- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas);
2. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
3. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;
5. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;
7. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
8. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
9. Jumlah Layanan Perkantoran;
10. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);
11. Jumlah Pengadaan Kendaraan DI nas Bermotor;
12. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/ Rupasas;
13. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
14. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
15. Jumlah Gedung/Bangunan;
16. Layanan BMN;
17. Layanan Hubungan Masyarakat;
18. Layanan umum;
19. Layanan perkantoran;
20. Layanan prasarana internal;



21. Layanan manajemen SDM;
22. Layanan perencanaan dan penganggaran;
23. Layanan pemantauan dan evaluasi;
24. Layanan manajemen keuangan;
25. Layanan reformasi kinerja.

Strategi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan kerangka kelembagaan Arah kebijakan strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru.

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat satuan kerja, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis satuan Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru :

A. Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum

- a. Sasaran Kegiatan
 - Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah;
 2. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dann bersertifikat;
 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya;
 4. Persentases klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga;
 5. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying;
 6. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian;
 7. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar;

8. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
9. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi;
10. Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas;
11. Persentase tahanan yang memperoleh Layanan penyuluhan hukum;
12. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap;
13. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
14. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
15. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi;
16. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal;
17. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum;
18. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib;
19. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya;
20. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan;
21. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar;
22. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin;
23. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani;
24. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal;
25. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas;
26. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi;
27. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;



28. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif;
 29. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar;
 30. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi;
 31. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh);
 32. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika;
 33. Pembinaan kepribadian dan layanan integrasi narapidana
 34. Kebutuhan dasar dan layanan kesehatan
 35. Pembinaan kemandirian narapidana
 36. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial
 37. Layanan keamanan dan ketertiban
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
- I. Mewujudkan layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru yang Prima di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Untuk mewujudkan layanan Kemenkumham yang Prima dalam konteks layanan pemasyarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan melalui inovasi dan pengembangan System Data Base Pemasyarakatan;
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan layanan pemasyarakatan;



- Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan value oriented;
- Penanganan Overcrowding di Lapas dan Rutan.

II. Untuk Mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dengan menerapkan strategi program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.35 Tahun 2018 sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan;
- Meningkatkan Objektivitas Penilaian Perubahan Perilaku Tahanan, Narapidana Dan Klien Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Dan Pembimbingan;
- Meningkatkan Peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Pada Lapas Dan Rutan; Dan
- Meningkatkan Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Barang Bukti Hasil Tindak Pidana.

III. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh UPT Pemasyarakatan. Untuk Menciptakan Keamanan & Ketertiban di Seluruh UPT Pemasyarakatan, strategi yang akan diterapkan sebagai

berikut :

- Melakukan standarisasi pencegahan, penindakan dan pemulihan gangguan keamanan, serta sarana dan prasarana keamanan dan pengamanan;
- Meningkatkan tindak lanjut pengaduan yang diselesaikan;
- Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban;
- Meningkatkan deteksi dini melalui operasi intelijen;
- Optimalisasi Satops Patnal Pemasarakatan.

B. Program dukungan Manajemen

- a. Sasaran Kegiatan
- b. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas);
 2. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
 3. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
 4. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan;
 5. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP);
 6. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan;
 7. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
 8. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
 9. Jumlah Layanan Perkantoran;
 10. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas);

11. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor;
 12. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/ Rupbasan;
 13. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
 14. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
 15. Jumlah Gedung/Bangunan;
 16. Layanan BMN;
 17. Layanan Hubungan Masyarakat;
 18. Layanan umum;
 19. Layanan perkantoran;
 20. Layanan prasarana internal;
 21. Layanan manajemen SDM;
 22. Layanan perencanaan dan penganggaran;
 23. Layanan pemantauan dan evaluasi;
 24. Layanan manajemen keuangan;
 25. Layanan reformasi kinerja.
- c. Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru
- Meningkatkan Kualitas Program dan Penganggaran di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
 - Meningkatkan intensitas dan kualitas publikasi kinerja dalam rangka Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal secara berkelanjutan;
 - Meningkatkan Layanan Data dan Informasi Berbasis Elektronik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;



- Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam rangka Terwujudnya ASN yang kompeten, profesional dan berintegritas;
- Pengelolaan anggaran yang efisien, efektif dan akuntabel Terwujudnya Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru;
- Otomasi pengelolaan administratif fasilitatif yang berkualitas Terwujudnya Optimalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi	80%



		keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Layanan
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 15.220.269.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 7.884.033.000
Total	Rp. 23.104.302.000



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

- **Penjelasan Capaian Per Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.**

Capaian kinerja organisasi pada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB pada Tahun 2023 ini dapat dilihat dari indikator tiap kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja 2023. Penjelasan capaian kinerja dengan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi disajikan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja dalam tabel berikut dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	Persentase pemenuhan layanan makanan yaitu : $\frac{\text{Jum Pemenuha layanan}}{\text{Jum tahanan/napi}} \times 100\%$ $= \frac{1075}{1075} \times 100\%$ $= 100\%$	100%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	Persentase layanan kesehatan (preventif) yaitu : $\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$ $= \frac{1.075}{1.075} \times 100\%$	100%



icare

e.gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEKAAN



DARI KORUPSI
KE BERSIH
ALWAYS THE BEST

				= 100%	
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Persentase penanganan gangguan mental yaitu : $\frac{\text{Jumlah napi yang ditangani}}{\text{Jumlah napi yang gangguan}} \times 100\%$ $= \frac{20}{20} \times 100\%$ $= 100\%$	100%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Persentase layanan lansia sesuai standar kesehatan yaitu : $\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$ $= \frac{15}{15} \times 100\%$ $= 100\%$	100%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Persentase layanan disabilitas sesuai standar yaitu : $\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$ $= \frac{6}{6} \times 100\%$ $= 100\%$	100%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular	80%	Persentase layanan penanganan penyakit menular	77,98%



		HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		<p>yaitu :</p> $\frac{(A + B)}{2} \times 100\%$ <p>A = Keberhasilan penanganan HIV-AIDS yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah napi dgn HIV - AIDS ditekan}}{\text{Jumlah napi dgn HIV - AIDS}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\% = 60\%$ <p>B = Keberhasilan penanganan Napi TB positif yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah napi dgn TB berhasil sembuh}}{\text{Jumlah napi dgn TB Positif}} \times 100\%$ $\frac{48}{49} \times 100\% = 97.96\%$	
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indicator ini dapat dihapuskan)	27%	<p>Persentase layanan rehabilitasi narkoba yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah pemenuhan layanan}}{\text{Jumlah tahanan}} \times 100\%$ $= \frac{180}{165} \times 100\%$ $= 109,09\%$	109,09%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	<p>Persentase napi dengan nilai baik pada instrument penilaian kepribadian yaitu :</p>	35,30%

Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			$\frac{\text{Jumlah napi dengan nilai baik}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{602}{1540} \times 100\%$ $= 35,30\%$	
	2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	Persentase napi yang dapat remisi yaitu : $\frac{\text{Jumlah napi dapat remisi}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{2052}{1540} \times 100\%$ $= 133,89\%$	133,89 %
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	Persentase napi yang dapat integrasi yaitu : $\frac{\text{Jumlah napi yang integrasi}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{635}{1540} \times 100\%$ $= 21,42\%$	41,23%
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	Persentase napi yang dapat hak pendidikan yaitu : $\frac{\text{Jumlah napi yg dpt pendidikan}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{0}{1540} \times 100\%$	0



				= 0%	
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	<p>Persentase napi resiko tinggi yang berubah perilakunya yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah napi resiko tinggi yang berubah}}{\text{Jumlah napi resiko tinggi}}$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0\%$	0%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	<p>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah napi ikut diklat}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{60}{1540} \times 100\%$ $= 3,89\%$	3,89%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	<p>Persentase narapidana yang bekerja dan produktif yaitu :</p> $\frac{\text{Jumlah napi yang bekerja}}{\text{Jumlah napi}} \times 100\%$ $= \frac{68}{1540} \times 100\%$ $= 4,42\%$	4,42%

3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu : $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di tl}}{\text{Jumlah pengaduna}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0$	0%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Persentase gangguan kamtib yang dapat di cegah yaitu : $\frac{\text{Jumlah gangguan yg dpt dicegah}}{\text{Jumlah gangguan}} \times 10$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0$	0
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Persentase kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib yaitu : $\frac{\text{Jumlah kepatuhan disiplin}}{\text{Jumlah gangguan kamtib}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 100\%$	0
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Persentase pemulihan kondisi pasca gangguan kamtib yaitu :	0



icare

e.gov
PASTI Nyata

REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEKAAN



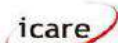
ALWAYS THE BEST

				$\frac{\text{Jlh pemulihan pasca gangguan}}{\text{Jumlah gangguan}} \times 100\%$ $= \frac{0}{0} \times 100\%$ $= 0$	
--	--	--	--	--	--

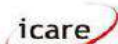
- Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel perbandingan capaian dibawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	
			2023	2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	100%	Null
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	Null
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100%	Null
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Null
		5. Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Null



		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	77,98%	Null
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indicator ini dapat dihapuskan)	109,09%	Null
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	35,30%	Null
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	133,89%	Null
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	41,23%	Null
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	0	Null
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	0	Null
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	3,89%	Null
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	4,42%	Null
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	0	Null
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	0	Null



		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	0	Null
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	0	Null

- Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target jangka menengah dalam dokumen Renstra dapat disampaikan dalam tabel perbandingan capaian dibawah ini :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	
			2023	Renstra 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	100%	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	94%
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	100%	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	85%
		5. Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan	77,98%	80%



		penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika (Bagi UPT Pelaksana Rehabilitasi, apabila tidak memiliki target rehabilitasi indicator ini dapat dihapuskan)	109,09%	27%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	8. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	35,30%	70%
		9. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	133,89%	99%
		10. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	41,23%	85%
		11. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	0	85%
		12. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	0	17%
		13. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	3,89%	31%
		14. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	4,42%	72%
		3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	15. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
16. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	0			80%
17. Persentase kepatuhan dan disiplin	0			85%



		terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib		
		18. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	0	80%

- **Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Standard Nasional**

Perbandingan capaian Tahun 2023 dengan Standard Nasional tidak dapat disampaikan karena belum ada data pendukung dan indikatornya.



- **Analisa penyebab terjadinya peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan**

- a. Berdasarkan perhitungan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 ini Lapas Kelas IIB Banjarbaru telah dapat menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah melampaui nilai target yang ditentukan, baik dibandingkan pada kinerja tahun sebelumnya ataupun dalam Rencana strategis Direktorat Pemasyarakatan;
- b. Beberapa kinerja yang telah melampaui target memang merupakan merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau narapidana/tahanan sehingga hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pelayanan yang baik dari seluruh komponen Lapas Kelas IIB Banjarbaru;
- c. Kinerja yang masih dibawah dari target yang diharapkan baik dari tahun lalu maupun target renstra harus menjadi strategi baru lagi dalam meningkatkannya. Beberapa strategi baru dapat dilaksanakan yaitu antara lain :
 - Peningkatan pemahaman akan arti penting pendidikan bagi masa depan napi/tahanan bila telah selesai menjalani masa pidananya;
 - Peningkatan kerjasama dengan pihak yang dapat memberikan layanan pendidikan dasar, menengah dan atas guna peningkatan kualitas napi/tahanan yang ada di Lapas. Seperti bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Balai Latihan Kerja, Sanggar Kegiatan Kerja dan lembaga Pendidikan dan latihan lainnya;
 - Peningkatan kerjasama dengan unsur kesehatan di lingkungan lapas guna memberikan layanan kesehatan;
 - Peningkatan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional daerah ataupun propinsi guna peningkatan kualitas rehabilitasi social pada napi/tahanan;
 - Peningkatan pemberian remisi, integrasi dan penilaian kepribadian kepada napi dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.



d. Beberapa faktor membaiknya pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran ialah sebagai berikut :

- ✓ pemantauan dan kontrol penyerapan anggaran pada satker oleh pimpinan yang semakin baik;
- ✓ evaluasi dalam mengetahui akurasi ketepatan penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran yang semakin membaik;
- ✓ penentuan langkah kerja dan rencana kerja yang diperlukan untuk percepatan penyerapan anggaran yang semakin baik;
- ✓ peningkatan motivasi pelaksana anggaran dalam bekerja dan berinovasi dalam upaya meningkatkan target kinerja yang juga semakin membaik.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.774.258.419 atau sekitar (98,57%) dari anggaran belanja sebesar Rp23.104.302.000.

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat sebesar Rp14.950.428.228,00
- b. Operasi Bidang Keamanan sebesar Rp40.735.800,00
- c. Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp7.592.415.043,00
- d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp174.149.898,00
- e. Layanan Manajemen SDM Internal sebesar Rp45.201.000,00 dan
- f. Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar Rp12.064.250,00

Target kinerja dari sasaran program kerja diatas yaitu

- Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak,
- Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah,
- Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi,


- Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar,
- Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Realisasi anggaran tahun 2023 Lapas Kelas IIB Banjarbaru

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp15.220.269.000	Rp14.950.428.228	98,2
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp7.884.033.000	Rp7.823.830.191	99,24
Total	Rp23.104.302.000	Rp22.774.258.419	98,57

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Lapas Kelas IIB Banjarbaru

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
 ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
 SATUAN KERJA : LAPAS KELAS IIB BANJARBARU 684001

Tgl Data : 24/02/24 6:27 AM
 Tgl Cetak : 24/02/24 9:24 AM
 Halaman : 1
 lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	17,673,000	24,357,450	6,684,450	138	0	22,812,875	22,812,875	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,673,000	24,357,450	6,684,450	138	0	22,812,875	22,812,875	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	17,673,000	24,357,450	6,684,450	138	0	22,812,875	22,812,875	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	23,104,302,000	22,774,077,935	(330,224,065)	99	23,308,510,000	22,882,339,221	(426,170,779)	98
1. Belanja Pegawai	6,159,794,000	6,156,312,974	(3,481,026)	100	6,230,708,000	6,100,749,089	(129,958,911)	98
2. Belanja Barang	16,770,358,000	16,443,615,063	(326,742,937)	98	17,027,802,000	16,731,761,122	(296,040,878)	98
3. Belanja Modal	174,150,000	174,149,898	(102)	100	50,000,000	49,829,010	(170,990)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : LAPAS KELAS IIB BANJARBARU 684001

Tgl Data : 24/02/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 24/02/24 9:24 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	23,104,302,000	22,774,077,935	(330,224,065)	99	23,308,510,000	22,882,339,221	(426,170,779)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi anggaran belanja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 yang lebih rinci dapat dilihat dalam realisasi belanja pada sub komponen pada tabel dibawah ini :

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	23,104,302,000	0	20,258,741,375	2,515,517,044	22,774,258,419	98.57 %	330,043,581
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	15,220,269,000	0	13,122,334,338	1,828,093,890	14,950,428,228	98.23 %	269,840,772
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	15,220,269,000	0	13,122,334,338	1,828,093,890	14,950,428,228	98.23 %	269,840,772
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15,164,969,000	0	13,087,668,538	1,822,023,890	14,909,692,428	98.32 %	255,276,572
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	59,100,000	0	10,403,000	40,223,150	50,626,150	85.66 %	8,473,850
051 Pembinaan Kepribadian	50,700,000	0	3,969,000	38,750,000	42,719,000	84.26 %	7,981,000
051.0A KONSELING	4,800,000	0	0	3,600,000	3,600,000	75.00 %	1,200,000
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000001. Penggandaan dan Penjilidan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
000002. Honor Konselor	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
051.0B Penyuluhan Hukum	400,000	0	264,000	0	264,000	66.00 %	136,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	264,000	0	264,000	66.00 %	136,000
000003. Penggandaan dan Penjilidan	400,000	0	264,000	0	264,000	66.00 %	136,000
051.0C Kegiatan Keagamaan	20,400,000	0	0	16,150,000	16,150,000	79.17 %	4,250,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000004. Banner, Spanduk	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	35.00 %	3,250,000
000005. Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	5,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	35.00 %	3,250,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
000006. Honor Pembina Keagamaan	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
000007. Transport Pembina Keagamaan	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00 %	0
051.0D Kegiatan Pramuka, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	11,800,000	0	0	10,200,000	10,200,000	86.44 %	1,600,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 2 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000008. Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	0	6,600,000	6,600,000	91.67 %	600,000
000009. Honor Instruktur	7,200,000	0	0	6,600,000	6,600,000	91.67 %	600,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
000010. Transport Pembina Kepramukaan	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00 %	0
051.OE Kegiatan Kesenian dan Olahraga	13,300,000	0	3,705,000	8,800,000	12,505,000	94.02 %	795,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	105,000	1,600,000	1,705,000	68.20 %	795,000
000011. Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga	2,500,000	0	105,000	1,600,000	1,705,000	68.20 %	795,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	300,000	6,900,000	7,200,000	100.00 %	0
000012. Honor Instruktur	7,200,000	0	300,000	6,900,000	7,200,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	3,300,000	300,000	3,600,000	100.00 %	0
000013. Transport Pembina Kesenian dan Olahraga	3,600,000	0	3,300,000	300,000	3,600,000	100.00 %	0
052 Layanan Integrasi dan TPP	8,400,000	0	6,434,000	1,473,150	7,907,150	94.13 %	492,850
052.OA Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	2,400,000	0	1,942,000	0	1,942,000	80.92 %	458,000
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	1,942,000	0	1,942,000	80.92 %	458,000
000014. Penggantian, Penjilidan dan Pelaporan	2,400,000	0	1,942,000	0	1,942,000	80.92 %	458,000
052.OB Pemberian Remisi, PB, CB, CMB dan CMK	6,000,000	0	4,492,000	1,473,150	5,965,150	99.42 %	34,850
521211 Belanja Bahan	6,000,000	0	4,492,000	1,473,150	5,965,150	99.42 %	34,850
000015. Penggantian, Penjilidan dan Pelaporan	6,000,000	0	4,492,000	1,473,150	5,965,150	99.42 %	34,850
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	14,435,449,000	0	12,435,625,774	1,781,360,740	14,216,986,514	98.49 %	218,462,486
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	14,435,449,000	0	12,435,625,774	1,781,360,740	14,216,986,514	98.49 %	218,462,486
005.OA Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	12,234,800,000	0	10,747,587,589	1,487,212,411	12,234,800,000	100.00 %	0
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	12,234,800,000	0	10,747,587,589	1,487,212,411	12,234,800,000	100.00 %	0
000037. Bahan Makanan Napi	12,234,800,000	0	10,747,587,589	1,487,212,411	12,234,800,000	100.00 %	0
005.OB Kebutuhan Sandang	531,700,000	0	510,400,000	0	510,400,000	95.99 %	21,300,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	531,700,000	0	510,400,000	0	510,400,000	95.99 %	21,300,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 3 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000039. Pakaian Tidur	130,000,000	0	127,600,000	0	127,600,000	98.15 %	2,400,000
000040. Pakaian harian	130,000,000	0	127,600,000	0	127,600,000	98.15 %	2,400,000
000041. Pakaian Olahraga	130,000,000	0	127,600,000	0	127,600,000	98.15 %	2,400,000
000042. Pakaian ibadah	130,000,000	0	127,600,000	0	127,600,000	98.15 %	2,400,000
000044. Pemenuhan sandang khusus pembinaan	11,700,000	0	0	0	0	0.00 %	11,700,000
005.OC Pemenuhan Sarana Makan Minum	344,199,000	0	247,776,000	66,423,000	314,199,000	91.28 %	30,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	164,199,000	0	97,776,000	66,423,000	164,199,000	100.00 %	0
000045. Penyediaan Peralatan Dapur	164,199,000	0	97,776,000	66,423,000	164,199,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	180,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	83.33 %	30,000,000
000046. Pemenuhan Peralatan Makan Minum	180,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	83.33 %	30,000,000
005.OD Pemenuhan Perlengkapan Mandi	150,000,000	0	149,300,000	0	149,300,000	99.53 %	700,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	150,000,000	0	149,300,000	0	149,300,000	99.53 %	700,000
000047. Pemenuhan Perlengkapan Mandi	150,000,000	0	149,300,000	0	149,300,000	99.53 %	700,000
005.OE Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	75,000,000	0	1,177,882	73,452,000	74,629,882	99.51 %	370,118
521211 Belanja Bahan	75,000,000	0	1,177,882	73,452,000	74,629,882	99.51 %	370,118
000172. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	75,000,000	0	1,177,882	73,452,000	74,629,882	99.51 %	370,118
005.OF Extra Voeding	300,000,000	0	278,168,100	0	278,168,100	92.72 %	21,831,900
521211 Belanja Bahan	300,000,000	0	278,168,100	0	278,168,100	92.72 %	21,831,900
000049. Kegiatan Pemberian Extra Voeding Bagi WBP Selama Bulan Puasa	300,000,000	0	278,168,100	0	278,168,100	92.72 %	21,831,900
005.OG Pemulasaran	37,500,000	0	1,055,000	415,000	1,470,000	3.92 %	36,030,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	37,500,000	0	1,055,000	415,000	1,470,000	3.92 %	36,030,000
000050. Pemulasaran	37,500,000	0	1,055,000	415,000	1,470,000	3.92 %	36,030,000
005.OH Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana Dan Anak	240,000,000	0	96,627,703	35,391,879	132,019,582	55.01 %	107,980,418
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	120,000,000	0	31,127,703	19,891,879	51,019,582	42.52 %	68,980,418
000051. Biaya Perawatan Luar Lapas	120,000,000	0	31,127,703	19,891,879	51,019,582	42.52 %	68,980,418

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 4 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191 Belanja Jasa Lainnya	120,000,000	0	65,500,000	15,500,000	81,000,000	67.50 %	39,000,000
000052. Honor jasa profesi	120,000,000	0	65,500,000	15,500,000	81,000,000	67.50 %	39,000,000
005.01 Perlengkapan Medis Poliklinik	360,000,000	0	241,533,500	118,466,450	359,999,950	100.00	50
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	360,000,000	0	241,533,500	118,466,450	359,999,950	100.00	50
000053. Pengadaan Obat-obatan Bagi Narapidana	240,000,000	0	218,288,500	21,711,500	240,000,000	100.00	0
000054. Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	120,000,000	0	23,245,000	96,754,950	119,999,950	100.00	50
005.0J Penanganan dan Pencegahan Covid-19	162,250,000	0	162,000,000	0	162,000,000	99.85 %	250,000
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	162,250,000	0	162,000,000	0	162,000,000	99.85 %	250,000
000055. Hand Sanitizer	1,050,000	0	800,000	0	800,000	76.19 %	250,000
000056. Masker Non Medis	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	100.00	0
000057. Cairan Disinfektan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000058. Sabun Cuci Tangan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana	76,600,000	0	75,277,800	440,000	75,717,800	98.85 %	882,200
051 Perencanaan	1,000,000	0	400,000	0	400,000	40.00 %	600,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000,000	0	400,000	0	400,000	40.00 %	600,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	400,000	0	400,000	40.00 %	600,000
000030. Snack	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000031. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
052 Pelaksanaan	74,600,000	0	74,577,800	0	74,577,800	99.97 %	22,200
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	74,600,000	0	74,577,800	0	74,577,800	99.97 %	22,200
521211 Belanja Bahan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000032. Snack Kegiatan	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,600,000	0	52,577,800	0	52,577,800	99.96 %	22,200
000033. Pengadaan Perlengkapan Kegiatan	52,600,000	0	52,577,800	0	52,577,800	99.96 %	22,200
522151 Belanja Jasa Profesi	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
000034. Honor Instruktur	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 5 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Evaluasi dan Pelaporan	1,000,000	0	300,000	440,000	740,000	74.00 %	260,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000,000	0	300,000	440,000	740,000	74.00 %	260,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	300,000	440,000	740,000	74.00 %	260,000
000035. Pencetakan Sertifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan	600,000	0	0	440,000	440,000	73.33 %	160,000
000036. Snack	400,000	0	300,000	0	300,000	75.00 %	100,000
BDC.007 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	593,820,000	0	566,361,964	0	566,361,964	95.38 %	27,458,036
051 Skrining dan Asesmen	44,990,000	0	39,837,964	0	39,837,964	88.55 %	5,152,036
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	44,990,000	0	39,837,964	0	39,837,964	88.55 %	5,152,036
521211 Belanja Bahan	43,490,000	0	38,337,964	0	38,337,964	88.15 %	5,152,036
000016. Tes Urine	27,000,000	0	24,975,000	0	24,975,000	92.50 %	2,025,000
000017. ATK	16,490,000	0	13,362,964	0	13,362,964	81.04 %	3,127,036
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000018. Transport Petugas Asesmen Awal	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052 Layanan Rehabilitasi Sosial	520,330,000	0	500,049,000	0	500,049,000	96.10 %	20,281,000
052.0A Asesmen Lanjutan	28,500,000	0	26,475,000	0	26,475,000	92.89 %	2,025,000
521211 Belanja Bahan	27,000,000	0	24,975,000	0	24,975,000	92.50 %	2,025,000
000019. Tes Urine	27,000,000	0	24,975,000	0	24,975,000	92.50 %	2,025,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000020. Transport Petugas Asesmen Lanjutan	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0B Konseling Adiksi	390,000,000	0	390,000,000	0	390,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390,000,000	0	390,000,000	0	390,000,000	100.00	0
000021. Uang Harian	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000	100.00	0
000022. Transport Petugas Asesmen Adiksi	234,000,000	0	234,000,000	0	234,000,000	100.00	0
052.0C Snack kegiatan	97,200,000	0	79,944,000	0	79,944,000	82.25 %	17,256,000
521211 Belanja Bahan	97,200,000	0	79,944,000	0	79,944,000	82.25 %	17,256,000
000023. Snack	97,200,000	0	79,944,000	0	79,944,000	82.25 %	17,256,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 6 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0D Case Conference Sidang Kasus	100,000	0	0	0	0	0 0.00 %	100,000
521211 Belanja Bahan	100,000	0	0	0	0	0 0.00 %	100,000
000024. Snack	100,000	0	0	0	0	0 0.00 %	100,000
052.0E Terapi Kelompok	3,600,000	0	2,700,000	0	2,700,000	75.00 %	900,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000	0	2,700,000	0	2,700,000	75.00 %	900,000
000025. Transport Petugas Terapi Kelompok	3,600,000	0	2,700,000	0	2,700,000	75.00 %	900,000
052.0F Family Support Group	930,000	0	930,000	0	930,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	630,000	0	630,000	0	630,000	100.00 %	0
000026. Snack	630,000	0	630,000	0	630,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00 %	0
000027. Transport Petugas Family Support Group	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00 %	0
053 Asesmen Akhir	28,500,000	0	26,475,000	0	26,475,000	92.89 %	2,025,000
053.0A Pelaksanaan Asesmen Akhir	28,500,000	0	26,475,000	0	26,475,000	92.89 %	2,025,000
521211 Belanja Bahan	27,000,000	0	24,975,000	0	24,975,000	92.50 %	2,025,000
000028. Tes Urine	27,000,000	0	24,975,000	0	24,975,000	92.50 %	2,025,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
000029. Transport Petugas Asesmen Awal	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	55,300,000	0	34,665,800	6,070,000	40,735,800	73.66 %	14,564,200
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	55,300,000	0	34,665,800	6,070,000	40,735,800	73.66 %	14,564,200
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	38,950,000	0	34,047,800	3,320,000	37,367,800	95.94 %	1,582,200
051.0A Penegakkan Keamanan dan Ketertiban	38,950,000	0	34,047,800	3,320,000	37,367,800	95.94 %	1,582,200
521211 Belanja Bahan	23,000,000	0	19,603,000	3,320,000	22,923,000	99.67 %	77,000
000059. Penggandaan dan Penjilidan	12,000,000	0	11,925,500	70,000	11,995,500	99.96 %	4,500
000165. Tambahan Belanja Penggandaan dan Penjilidan	11,000,000	0	7,677,500	3,250,000	10,927,500	99.34 %	72,500
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15,950,000	0	14,444,800	0	14,444,800	90.56 %	1,505,200
000060. Kebutuhan Razia, Pengeledahan dan Gangguan	15,950,000	0	14,444,800	0	14,444,800	90.56 %	1,505,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 7 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Kantib	15,950,000	0	14,444,800	0	14,444,800	90.56 %	1,505,200
052 Pengawasan	16,350,000	0	618,000	2,750,000	3,368,000	20.60 %	12,982,000
052.0A Pengawasan Narapidana	13,200,000	0	450,000	0	450,000	3.41 %	12,750,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000061. Transport	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
000062. Uang Harian	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	450,000	0	450,000	6.25 %	6,750,000
000063. Transport Pengawasan	7,200,000	0	450,000	0	450,000	6.25 %	6,750,000
052.0B Perpindahan (Mulasi) Narapidana	3,150,000	0	168,000	2,750,000	2,918,000	92.63 %	232,000
521211 Belanja Bahan	400,000	0	168,000	0	168,000	42.00 %	232,000
000064. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	400,000	0	168,000	0	168,000	42.00 %	232,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,750,000	0	0	2,750,000	2,750,000	100.00 %	0
000065. Transport	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00 %	0
000066. Uang harian	1,750,000	0	0	1,750,000	1,750,000	100.00 %	0
WA Program Dukungan Manajemen	7,884,033,000	0	7,136,407,037	687,423,154	7,823,830,191	99.24 %	60,202,809
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	7,884,033,000	0	7,136,407,037	687,423,154	7,823,830,191	99.24 %	60,202,809
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,647,253,000	0	6,914,842,139	677,572,904	7,592,415,043	99.28 %	54,837,957
EBA.956 Layanan BMN	980,000	0	450,000	0	450,000	45.92 %	530,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	900,000	0	450,000	0	450,000	50.00 %	450,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	900,000	0	450,000	0	450,000	50.00 %	450,000
521211 Belanja Bahan	600,000	0	150,000	0	150,000	25.00 %	450,000
000067. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	600,000	0	150,000	0	150,000	25.00 %	450,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00 %	0
000068. Transport lokal	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00 %	0
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000
052.0A Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 8 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	80,000	0	0	0	0	0.00 %	80,000
000069. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000070. Pokja Pengadaan BAMA	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	13,200,000	0	350,000	0	350,000	2.65 %	12,850,000
051 Penyediaan Informasi Publik	7,800,000	0	300,000	0	300,000	3.85 %	7,500,000
051.0A Penyediaan Informasi Publik	7,800,000	0	300,000	0	300,000	3.85 %	7,500,000
521211 Belanja Bahan	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000147. Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	300,000	0	300,000	16.67 %	1,500,000
000148. Transport lokal	1,800,000	0	300,000	0	300,000	16.67 %	1,500,000
052 Kerja Sama	5,400,000	0	50,000	0	50,000	0.93 %	5,350,000
052.0A Kerja sama	5,400,000	0	50,000	0	50,000	0.93 %	5,350,000
521211 Belanja Bahan	3,600,000	0	50,000	0	50,000	1.39 %	3,550,000
000149. Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan	3,600,000	0	50,000	0	50,000	1.39 %	3,550,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000150. Transport dalam kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
EBA.962 Layanan Umum	58,190,000	0	40,456,593	7,324,500	47,781,093	82.11 %	10,408,907
051 Urusan Umum	33,120,000	0	16,056,593	7,324,500	23,381,093	70.60 %	9,738,907
051.0A Urusan Umum	33,120,000	0	16,056,593	7,324,500	23,381,093	70.60 %	9,738,907
521211 Belanja Bahan	31,320,000	0	15,756,593	7,324,500	23,081,093	73.89 %	8,238,907
000143. Pengadaan, Penjilidan dan Pelaporan	6,000,000	0	0	0	0	0.00 %	6,000,000
000144. Spanduk, Banner dan Leaflet	25,320,000	0	15,756,593	7,324,500	23,081,093	91.16 %	2,238,907
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	300,000	0	300,000	16.67 %	1,500,000
000145. Transport lokal	1,800,000	0	300,000	0	300,000	16.67 %	1,500,000
052 Fasilitas Kerja New Normal	25,070,000	0	24,400,000	0	24,400,000	97.33 %	670,000
052.0A Fasilitas Kerja New Normal	25,070,000	0	24,400,000	0	24,400,000	97.33 %	670,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 9 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	25,070,000	0	24,400,000	0	24,400,000	97.33 %	670,000
000146. Pengadaan Test Swab untuk kegiatan insidentif	25,070,000	0	24,400,000	0	24,400,000	97.33 %	670,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	7,574,883,000	0	6,873,585,546	670,248,404	7,543,833,950	99.59 %	31,049,050
001 Gaji dan Tunjangan	6,159,794,000	0	5,607,763,665	548,729,793	6,156,493,458	99.95 %	3,300,542
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	6,129,440,000	0	5,577,429,665	548,729,793	6,126,159,458	99.95 %	3,280,542
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	3,966,468,000	0	3,680,159,740	286,238,100	3,966,397,840	100.00 %	70,160
000071. Belanja Gaji Pokok PNS	3,399,774,000	0	3,113,466,680	286,238,100	3,399,704,780	100.00 %	69,220
000072. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	283,583,000	0	283,582,700	0	283,582,700	100.00 %	300
000073. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	283,111,000	0	283,110,360	0	283,110,360	100.00 %	640
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	94,000	0	75,087	5,511	80,598	85.74 %	13,402
000074. Belanja Pembulatan Gaji PNS	78,000	0	59,691	5,511	65,202	83.59 %	12,798
000075. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	8,000	0	7,710	0	7,710	96.38 %	290
000076. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	8,000	0	7,686	0	7,686	96.08 %	314
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	296,606,000	0	272,170,240	21,900,250	294,070,490	99.15 %	2,535,510
000077. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	252,510,000	0	230,510,400	21,900,250	252,410,650	99.96 %	99,350
000078. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	21,173,000	0	21,100,950	0	21,100,950	99.66 %	72,050
000079. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	22,923,000	0	20,558,890	0	20,558,890	89.69 %	2,364,110
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	70,054,000	0	64,806,538	5,240,342	70,046,880	99.99 %	7,120
000080. Belanja Tunj. Anak PNS	60,129,000	0	54,882,534	5,240,342	60,122,876	99.99 %	6,124
000081. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	4,970,000	0	4,969,120	0	4,969,120	99.98 %	880
000082. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	4,955,000	0	4,954,884	0	4,954,884	100.00 %	116
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	70,080,000	0	64,610,000	5,460,000	70,070,000	99.99 %	10,000
000083. Belanja Tunjangan Struktural PNS	60,140,000	0	54,670,000	5,460,000	60,130,000	99.98 %	10,000
000084. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	4,970,000	0	4,970,000	0	4,970,000	100.00 %	0
000085. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	4,970,000	0	4,970,000	0	4,970,000	100.00 %	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	315,790,000	0	292,875,000	22,470,000	315,345,000	99.86 %	445,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 10 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000086. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	22,770,000	0	22,760,000	0	22,760,000	99.96 %	10,000
000087. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	270,260,000	0	247,595,000	22,470,000	270,065,000	99.93 %	195,000
000088. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	22,760,000	0	22,520,000	0	22,520,000	98.95 %	240,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	603,000	0	309,100	289,750	598,850	99.31 %	4,150
000089. Belanja Tunjangan PPh PNS	293,000	0	0	289,750	289,750	98.89 %	3,250
000090. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	155,000	0	154,550	0	154,550	99.71 %	450
000091. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	155,000	0	154,550	0	154,550	99.71 %	450
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	299,819,000	0	277,947,960	21,870,840	299,818,800	100.00 %	200
000092. Belanja Tunj Beras PNS	299,819,000	0	277,947,960	21,870,840	299,818,800	100.00 %	200
511129 Belanja Uang Makan PNS	1,085,746,000	0	901,976,000	183,635,000	1,085,611,000	99.99 %	135,000
000093. Belanja Uang Makan Gol. IV	13,408,000	0	9,635,000	3,690,000	13,325,000	99.38 %	83,000
000094. Belanja Uang Makan Gol. III	249,158,000	0	204,906,000	44,215,000	249,121,000	99.99 %	37,000
000095. Belanja Uang Makan Gol. II	823,180,000	0	687,435,000	135,730,000	823,165,000	100.00 %	15,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,180,000	0	22,500,000	1,620,000	24,120,000	99.75 %	60,000
000096. Belanja Tunjangan Umum PNS	24,180,000	0	22,500,000	1,620,000	24,120,000	99.75 %	60,000
001.0B Uang Lembur	30,354,000	0	30,334,000	0	30,334,000	99.93 %	20,000
512211 Belanja Uang Lembur	30,354,000	0	30,334,000	0	30,334,000	99.93 %	20,000
000097. Uang Lembur Gol. IV	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00 %	0
000098. Uang lembur Gol. III	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00 %	0
000099. Uang Lembur Gol. II	14,668,000	0	14,668,000	0	14,668,000	99.86 %	20,000
000100. Uang Makan Lembur Gol. IV	123,000	0	123,000	0	123,000	100.00 %	0
000101. Uang Makan lembur Gol. II	10,080,000	0	10,080,000	0	10,080,000	100.00 %	0
000102. Uang Makan Lembur Gol. III	1,998,000	0	1,998,000	0	1,998,000	100.00 %	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,415,089,000	0	1,265,821,881	121,518,611	1,387,340,492	98.04 %	27,748,508
002.0A Kesehatan Pegawai	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 11 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000103. Pemenuhan Kebutuhan Obat-obatan Pegawai	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
002.0B Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259,790,000	0	258,451,875	0	258,451,875	99.48 %	1,338,125
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259,790,000	0	258,451,875	0	258,451,875	99.48 %	1,338,125
000104. Gedung dan Bangunan Tidak Bertingkat	90,000,000	0	89,215,000	0	89,215,000	99.13 %	785,000
000105. Gedung dan Bangunan Bertingkat	125,000,000	0	124,640,875	0	124,640,875	99.71 %	359,125
000106. Halaman	3,000,000	0	2,948,000	0	2,948,000	98.27 %	52,000
000166. Tambahan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,790,000	0	31,735,000	0	31,735,000	98.83 %	55,000
000173. Tambahan ke-2	10,000,000	0	9,913,000	0	9,913,000	99.13 %	87,000
002.0C Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	58,900,000	0	41,463,000	1,347,000	42,810,000	72.68 %	16,090,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58,900,000	0	41,463,000	1,347,000	42,810,000	72.68 %	16,090,000
000107. Komputer	2,190,000	0	1,737,000	445,000	2,182,000	99.63 %	8,000
000108. Instalasi Air	20,426,000	0	20,000,000	0	20,000,000	97.91 %	426,000
000109. Instalasi Listrik	17,534,000	0	10,525,000	0	10,525,000	60.03 %	7,009,000
000110. Scanner	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000111. Kulkas	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000112. Sarana Kamtb	2,000,000	0	870,000	672,000	1,542,000	77.10 %	458,000
000113. Printer	2,070,000	0	1,322,000	0	1,322,000	63.86 %	748,000
000114. AC	3,050,000	0	1,730,000	0	1,730,000	56.72 %	1,320,000
000115. Genset	1,500,000	0	1,374,000	0	1,374,000	91.60 %	126,000
000116. Laptop	730,000	0	495,000	230,000	725,000	99.32 %	5,000
000117. Inventaris Kantor	6,900,000	0	3,410,000	0	3,410,000	49.42 %	3,490,000
000118. Mesin Fotokopi	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000119. TV	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
000120. Jaringan Telepon dan PABX	500,000	0	0	0	0	0.00 %	500,000
002.0D Pemeliharaan Kendaraan	83,500,000	0	55,086,814	20,741,381	75,828,195	90.81 %	7,671,805
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	83,500,000	0	55,086,814	20,741,381	75,828,195	90.81 %	7,671,805

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 12 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000121. Roda 4	36,000,000	0	35,985,816	0	35,985,816	99.96 %	14,184
000122. Roda 2	10,000,000	0	2,919,965	559,177	3,479,142	34.79 %	6,520,858
000123. Traktor	3,500,000	0	2,692,500	0	2,692,500	76.93 %	807,500
000167. Roda 6	4,000,000	0	1,500,000	2,173,285	3,673,285	91.83 %	326,715
000174. Tambahan Belanja Roda 4	30,000,000	0	11,988,533	18,008,919	29,997,452	99.99 %	2,548
002.0E Langganan Daya dan Jasa	793,014,000	0	722,502,024	70,159,800	792,661,824	99.96 %	352,176
522111 Belanja Langganan Listrik	792,714,000	0	722,502,024	70,159,800	792,661,824	99.99 %	52,176
000124. Langganan Listrik	792,714,000	0	722,502,024	70,159,800	792,661,824	99.99 %	52,176
522112 Belanja Langganan Telepon	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000125. Langganan Telepon	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
522113 Belanja Langganan Air	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000126. Langganan Air	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000127. Langganan Internet	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
002.0F Jasa Pos	600,000	0	36,400	500,000	536,400	89.40 %	63,600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600,000	0	36,400	500,000	536,400	89.40 %	63,600
000128. Surat Pos	600,000	0	36,400	500,000	536,400	89.40 %	63,600
002.0G Keperluan Perkantoran	47,850,000	0	45,306,055	2,470,870	47,776,925	99.85 %	73,075
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,750,000	0	28,295,410	417,000	28,712,410	99.87 %	37,590
000129. Keperluan Pokok	28,750,000	0	28,295,410	417,000	28,712,410	99.87 %	37,590
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,100,000	0	17,010,645	2,053,870	19,064,515	99.81 %	35,485
000130. ATK	19,100,000	0	17,010,645	2,053,870	19,064,515	99.81 %	35,485
002.0H Konsultasi dan Koordinasi	3,600,000	0	3,000,000	150,000	3,150,000	87.50 %	450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,600,000	0	3,000,000	150,000	3,150,000	87.50 %	450,000
000131. Transport	3,600,000	0	3,000,000	150,000	3,150,000	87.50 %	450,000
002.0I Jamuan Tamu	10,000,000	0	9,240,000	0	9,240,000	92.40 %	760,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 13 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	10,000,000	0	9,240,000	0	9,240,000	92.40 %	760,000
000132. Jamuan Tamu	10,000,000	0	9,240,000	0	9,240,000	92.40 %	760,000
002.0J Honor Operasional Satuan Kerja	66,010,000	0	53,250,000	12,300,000	65,550,000	99.30 %	460,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66,010,000	0	53,250,000	12,300,000	65,550,000	99.30 %	460,000
000133. Pengelola GLP	1,800,000	0	1,350,000	450,000	1,800,000	100.00 %	0
000134. Kuasa Pengguna Anggaran	36,000,000	0	30,000,000	6,000,000	36,000,000	100.00 %	0
000135. Pejabat Pembuat Komitmen	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000136. Pejabat Penguji SPM	14,400,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	100.00 %	0
000137. Bendahara Pengeluaran	12,000,000	0	9,000,000	3,000,000	12,000,000	100.00 %	0
000164. Pengelola BMN	1,800,000	0	900,000	450,000	1,350,000	75.00 %	450,000
002.0K Penambah Daya Tahan Tubuh	71,175,000	0	57,107,223	13,849,560	70,956,783	99.69 %	218,217
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	71,175,000	0	57,107,223	13,849,560	70,956,783	99.69 %	218,217
000138. Penyediaan Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas Jaga Malam	71,175,000	0	57,107,223	13,849,560	70,956,783	99.69 %	218,217
002.0L Penanganan dan Pencegahan Covid-19	20,400,000	0	20,378,490	0	20,378,490	99.89 %	21,510
521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	20,400,000	0	20,378,490	0	20,378,490	99.89 %	21,510
000139. Masker Non Medis	8,510,000	0	8,501,490	0	8,501,490	99.90 %	8,510
000140. Hand Sanitizer	10,000,000	0	9,990,000	0	9,990,000	99.90 %	10,000
000141. Cairan Disinfektan	950,000	0	947,940	0	947,940	99.78 %	2,060
000142. Sabun Cuci Tangan	940,000	0	939,060	0	939,060	99.90 %	940
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102
EBB 971 Layanan Prasarana Internal	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102
051 Gedung dan Bangunan	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102
051.0A Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102
000151. Perbaikan Jaringan/Penambahan Instalasi Listrik	174,150,000	0	174,149,898	0	174,149,898	100.00 %	102

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 14 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	47,470,000	0	45,130,000	71,000	45,201,000	95.22 %	2,269,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	47,470,000	0	45,130,000	71,000	45,201,000	95.22 %	2,269,000
051 Pembinaan Kepegawaian	47,170,000	0	44,980,000	0	44,980,000	95.36 %	2,190,000
051.0A Pembinaan Fisik dan Mental	47,170,000	0	44,980,000	0	44,980,000	95.36 %	2,190,000
521211 Belanja Bahan	3,450,000	0	1,860,000	0	1,860,000	53.91 %	1,590,000
000152. Snack	3,450,000	0	1,860,000	0	1,860,000	53.91 %	1,590,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	43,120,000	0	43,120,000	0	43,120,000	100.00 %	0
000153. Kegiatan FMD	34,500,000	0	34,500,000	0	34,500,000	100.00 %	0
000169. Tambahan Belanja Kegiatan FMD	8,620,000	0	8,620,000	0	8,620,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000154. Honorarium Narasumber	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
052 Administrasi Kepegawaian	300,000	0	150,000	71,000	221,000	73.67 %	79,000
052.0A Administrasi Kepegawaian	300,000	0	150,000	71,000	221,000	73.67 %	79,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	150,000	71,000	221,000	73.67 %	79,000
000155. Penggandaan dan Penjilidan	300,000	0	150,000	71,000	221,000	73.67 %	79,000
EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,160,000	0	2,285,000	9,779,250	12,064,250	79.58 %	3,095,750
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	800,000	0	150,000	300,000	450,000	56.25 %	350,000
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	800,000	0	150,000	300,000	450,000	56.25 %	350,000
051.0A Penyusunan RKAKL	800,000	0	150,000	300,000	450,000	56.25 %	350,000
521211 Belanja Bahan	200,000	0	150,000	0	150,000	75.00 %	50,000
000156. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	200,000	0	150,000	0	150,000	75.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	0	300,000	300,000	50.00 %	300,000
000157. Transport dalam kota	600,000	0	0	300,000	300,000	50.00 %	300,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3,010,000	0	450,000	300,000	750,000	24.92 %	2,260,000
051 Penyusunan Laporan Kinerja	3,010,000	0	450,000	300,000	750,000	24.92 %	2,260,000
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	3,010,000	0	450,000	300,000	750,000	24.92 %	2,260,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 684001 LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Hal 15 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	2,410,000	0	150,000	0	150,000	6.22 %	2,260,000
000162. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,410,000	0	150,000	0	150,000	6.22 %	2,260,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	300,000	300,000	600,000	100.00 %	0
000163. Transport dalam kota	600,000	0	300,000	300,000	600,000	100.00 %	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	900,000	0	435,000	0	435,000	48.33 %	465,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	900,000	0	435,000	0	435,000	48.33 %	465,000
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	900,000	0	435,000	0	435,000	48.33 %	465,000
521211 Belanja Bahan	600,000	0	285,000	0	285,000	47.50 %	315,000
000160. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	600,000	0	285,000	0	285,000	47.50 %	315,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	150,000	0	150,000	50.00 %	150,000
000161. Transport dalam Kota	300,000	0	150,000	0	150,000	50.00 %	150,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	10,450,000	0	1,250,000	9,179,250	10,429,250	99.80 %	20,750
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	10,450,000	0	1,250,000	9,179,250	10,429,250	99.80 %	20,750
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	10,450,000	0	1,250,000	9,179,250	10,429,250	99.80 %	20,750
521211 Belanja Bahan	10,000,000	0	800,000	9,179,250	9,979,250	99.79 %	20,750
000158. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	10,000,000	0	800,000	9,179,250	9,979,250	99.79 %	20,750
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00 %	0
000159. Transport dalam kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai SMART/Capaian RO

Capaian Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi SAKTI dengan tujuan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja untuk memudahkan K/L dalam melakukan monev kinerja program secara mandiri (*self evaluation*).

Saat ini penilaian target kinerja tidak lagi melalui Aplikasi SMART namun sudah termasuk di dalam Aplikasi SAKTI Keuangan pada bagian Realisasi Capaian Output.

Nilai kinerja pada Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2023 Lapas Kelas IIB Banjarbaru dapat disampaikan dalam sebagai berikut :



LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-05
 Kementerian Negara/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Eselon 1 : 013.05 - DITJEN PEMASYARAKATAN
 Wilayah/Provinsi : 15.52 - KOTA BANJARBARU/KALIMANTAN SELATAN
 Satuan Kerja : 684001 - LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 28-06-2023

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	22,927,989,000.00	9,738,014,243.00	42.47%							
03	PEMBINAAN HUKUM	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
WA	Program Dukungan Manajemen	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,114,360,000.00	3,202,169,439.00	62.61%							
956		9,600,000.00	150,000.00	1.56%	1.0000		1.0000	50.1%	48.54%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
958		13,200,000.00	50,000.00	0.38%	1.0000		1.0000	50.48%	50.1%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
962		58,190,000.00	31,953,123.00	54.91%	1.0000		1.0000	50.1%	-4.81%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
994		5,033,370,000.00	3,170,016,316.00	62.98%	1.0000		1.0000	50.1%	-12.88%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	174,150,000.00	174,149,898.00	100%							
971		174,150,000.00	174,149,898.00	100%	1.0000		1.0000	100%	0%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38,850,000.00	2,010,000.00	5.17%							




Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
954		38,850,000.00	2,010,000.00	5.17%	115.0000		60.0000	50.1%	44.93%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,160,000.00	700,000.00	4.62%							
952		800,000.00	150,000.00	18.75%	1.0000		1.0000	50.1%	31.35%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
953		3,010,000.00	150,000.00	4.98%	1.0000		1.0000	50.1%	45.12%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
955		900,000.00	200,000.00	22.22%	1.0000		1.0000	50.1%	27.88%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
961		10,450,000.00	200,000.00	1.91%	1.0000		1.0000	50.1%	48.19%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	17,530,169,000.00	6,335,528,606.00	36.14%							
002		59,100,000.00	4,018,000.00	6.8%	2,000.0000		830.0000	50.1%	43.3%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
004		16,800,649,000.00	6,070,670,131.00	36.13%	2,003.0000		830.0000	50.1%	13.97%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
006		76,600,000.00	19,600,000.00	25.59%	40.0000		15.0000	50.1%	24.51%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
007		593,820,000.00	241,240,475.00	40.63%	180.0000		61.0000	50.1%	9.47%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
BHB	Operasi Bidang Keamanan	55,300,000.00	23,456,300.00	42.42%							
002		55,300,000.00	23,456,300.00	42.42%	12.0000		4.0000	50.1%	7.68%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA di Lapas Kelas IIB Banjarbaru bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Berikut Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA di Lapas Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar 99,17 yang dapat dilihat sebagai tabel berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Kelas IIB Banjarbaru

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	045	013	684001	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	Nilai	100.00	91.66	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.17	100%	99.17
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.17	20.00	10.00	10.00	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.83		100.00					100.00			



D. Capaian Kinerja Lainnya

- E-Performance

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada aplikasi E-Performance Kementerian Hukum dan Ham. Aplikasi ini adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Aplikasi E-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Berikut Laporan Kinerja Realisasi Anggaran berdasarkan Target pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB Banjarbaru dalam Aplikasi E-Performance.

- Target Kinerja

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada Capaian Kinerja aplikasi SAKTI modul Pejabat Pembuat Komitmen. Capaian Kinerja ini menunjukkan seberapa tinggi capaian kinerja yang telah di tempuh oleh sebuah satuan kerja dalam hal ini yaitu Lapas Kelas IIB Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2023. Nilai capaian kinerja ini bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Target kinerja Lembaga Pemasarakatan juga sudah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang di jabarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		Persentase narapidana yang	85%



		mendapatkan hak integrasi	
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Kendaraan Bermotor	1 Layanan
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
		Jumlah Gedung/Bangunan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

Dan berikut Laporan Kinerja Realisasi Anggaran berdasarkan Target pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB Banjarbaru dalam penilaian Capaian Kinerja :

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-05
 Kementerian Negara/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Eselon 1 : 013.05 - DITJEN PEMASYARAKATAN
 Wilayah/Provinsi : 15.52 - KOTA BANJARBARU/KALIMANTAN SELATAN
 Satuan Kerja : 684001 - LAPAS KELAS IIB BANJARBARU

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 28-06-2023

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	22,927,989,000.00	9,738,014,243.00	42.47%							
03	PEMBINAAN HUKUM	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
WA	Program Dukungan Manajemen	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5,342,520,000.00	3,379,029,337.00	63.25%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,114,360,000.00	3,202,169,439.00	62.61%							
956		9,600,000.00	150,000.00	1.56%	1.0000		1.0000	50.1%	48.54%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
958		13,200,000.00	50,000.00	0.38%	1.0000		1.0000	50.48%	50.1%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
962		58,190,000.00	31,953,123.00	54.91%	1.0000		1.0000	50.1%	-4.81%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
994		5,033,370,000.00	3,170,016,316.00	62.98%	1.0000		1.0000	50.1%	-12.88%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	174,150,000.00	174,149,898.00	100%							
971		174,150,000.00	174,149,898.00	100%	1.0000		1.0000	100%	0%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38,850,000.00	2,010,000.00	5.17%							

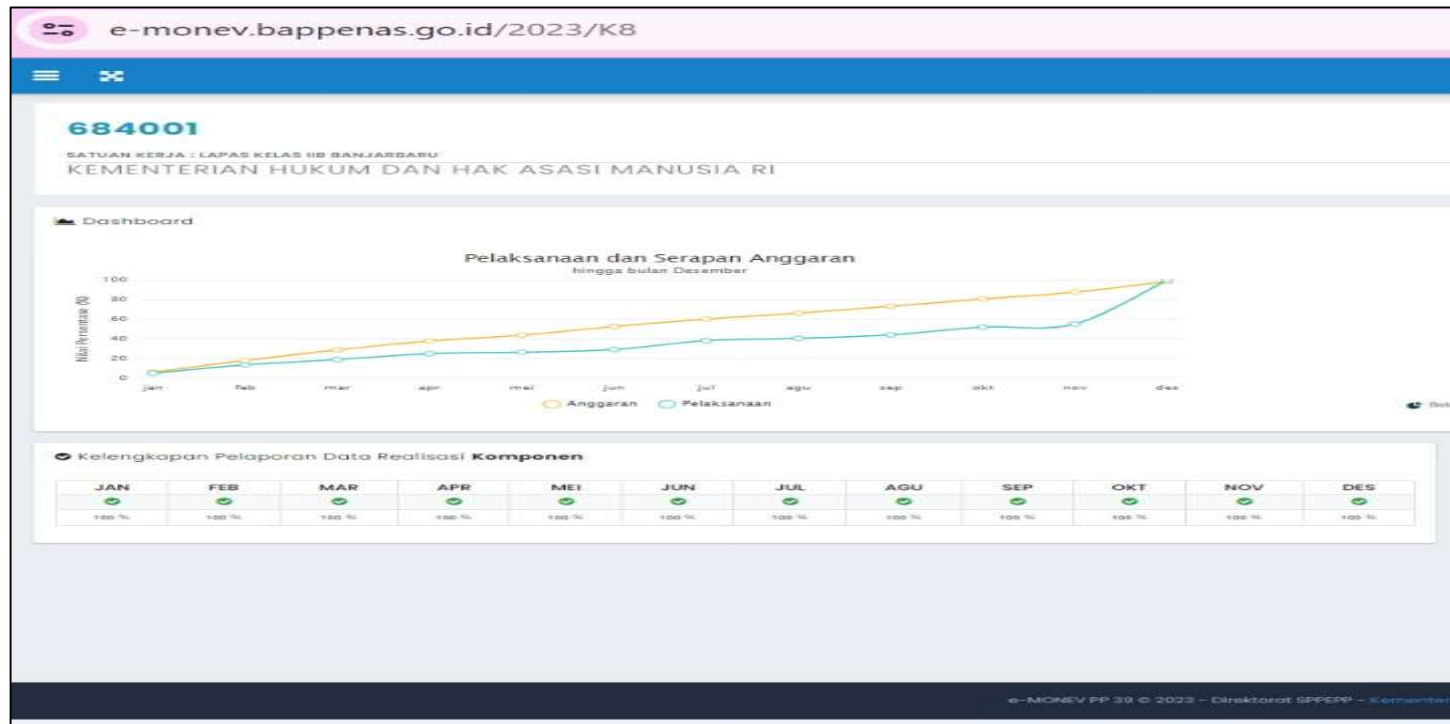


Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
954		38,850,000.00	2,010,000.00	5.17%	115.0000		60.0000	50.1%	44.93%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,160,000.00	700,000.00	4.62%							
952		800,000.00	150,000.00	18.75%	1.0000		1.0000	50.1%	31.35%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
953		3,010,000.00	150,000.00	4.98%	1.0000		1.0000	50.1%	45.12%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
955		900,000.00	200,000.00	22.22%	1.0000		1.0000	50.1%	27.88%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
961		10,450,000.00	200,000.00	1.91%	1.0000		1.0000	50.1%	48.19%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	17,585,469,000.00	6,358,984,906.00	36.16%							
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	17,530,169,000.00	6,335,528,606.00	36.14%							
002		59,100,000.00	4,018,000.00	6.8%	2,000.0000		830.0000	50.1%	43.3%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
004		16,800,649,000.00	6,070,670,131.00	36.13%	2,003.0000		630.0000	50.1%	13.97%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
006		76,600,000.00	19,600,000.00	25.59%	40.0000		15.0000	50.1%	24.51%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
007		593,820,000.00	241,240,475.00	40.63%	180.0000		61.0000	50.1%	9.47%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui
BHB	Operasi Bidang Keamanan	55,300,000.00	23,456,300.00	42.42%							
002		55,300,000.00	23,456,300.00	42.42%	12.0000		4.0000	50.1%	7.68%	(00)	dihitung secara profesional berdasarkan jumlah bulan yang dilalui



- E-Monev Bappenas

Capaian Kinerja lainnya juga dapat dilihat pada aplikasi E-Monev Bappenas. Aplikasi ini adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit Lapas Kelas IIB Banjarbaru. Aplikasi E-Monev Bappenas menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Berikut Laporan Kinerja Realisasi Anggaran berdasarkan Target pencapaian kinerja di Lapas Kelas IIB Banjarbaru dalam Aplikasi E-Performance.

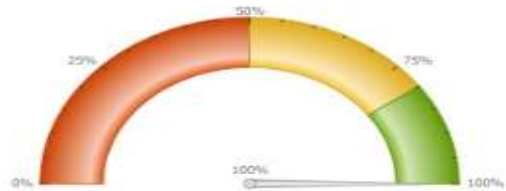


Sebaran Kategori Pelaksanaan
hingga bulan Desember



Belum dilaporkan
Perencanaan
Pembiayaan
Pelaksanaan
Selesai

Persentase Kemanfaatan
hingga bulan Desember



Kelengkapan Pelaporan Data Realisasi Rincian Output

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- Kegiatan Prioritas Nasional

Pada Tahun 2023 ini tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional yang dikerjakan.



Bab IV

Penutup

a. Kesimpulan

Secara umum penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Harus diakui keterbatasan fasilitas sangat menghambat kinerja Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di masing-masing lingkungan kerja, hal lain seperti hambatan teknis yang juga masih membutuhkan perhatian berbagai pihak khususnya pemerintah pusat.

Pandemi Covid-19 yang telah lalu, menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. SOP baru yang dibentuk saat terjadinya pandemi, apabila masih relevan, maka akan terus dipertahankan. Namun apabila tidak relevan atau tidak diperlukan lagi, maka SOP tersebut akan dihentikan secara total.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas karena kurangnya pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk minimnya Pejabat yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Sarana dan prasarana yang kurang mendukung baik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru masih perlu penambahan seperti Rumah Dinas Kepala, Pejabat Struktural dan staf. Guna mobilitas operasional satuan kerja berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) juga perlu dilakukan penambahan dan peremajaan.

Termasuk juga peremajaan dan penggantian sarana dan prasarana kerja seperti meja, kursi pejabat / pegawai dan meja/ kursi rapat.

Meskipun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, upaya untuk mengatasi permasalahan terus dilakukan baik itu melalui kebijakan pimpinan maupun inisiatif dan

inovatif yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan, khususnya dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lapas.

Namun segala hal tersebut diatas tentu saja harus didukung dengan kesejahteraan yang memadai bagi pegawai guna mendorong bekerja lebih baik sekaligus mengantisipasi praktek-praktek seperti pengutan liar dan perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan.

b. Saran

- ✓ Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas, mengingat kompleksitas kebutuhan masyarakat dewasa ini, selain itu pembangunan hukum menuntut perubahan yang bersifat terus menerus. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dalam melayani kebutuhan hukum masyarakat;
- ✓ Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan, baik diklat teknis, diklat fungsional maupun diklat penjenjangan khususnya petugas pengamanan pemasyarakatan, perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar pemasyarakatan, seperti kesamaptaan dan lain-lain, serta dilaksankannya roling jabatan secara berkala; dan
- ✓ Peningkatan Sarana dan Prasarana di satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Banjarbaru disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sekaligus sebagai bahan periksa.



Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Banjarbaru

Dayan Nurasta Wibawa, Amd.IP., S.H., M.M
NIP. 198004052000121001



Lampiran – Lampiran



REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEHAAN



KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2023











**Penghargaan Satuan Kerja dengan IKPA Tertinggi Periode Tahun 2023 dari
KPPN Banjarmasin**





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-46/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEPADA

Lapas Kelas II B Banjarbaru
(684001)

SEBAGAI

TERBAIK KETIGA

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

KATEGORI SATKER PAGU BESAR

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
 NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,



Ditandatangani secara elektronik
 TRI ANANTO PUTRO





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR MELAYAN DIRJEKORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PUSKOPUS KALIBURAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-50/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEPADA

Lapas Kelas II B Banjarbaru
(684001)

SEBAGAI

TERBAIK KETIGA
CAPAIAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2023

KATEGORI SATKER TARGET OUTPUT SEDANG

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
 KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
 NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,



Ditandatangani secara elektronik
 TRI ANANTO PUTRO





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-59/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEPADA

Fermady
Lapas Kelas UB Banjarmasin

SEBAGAI

TERBAIK KEDUA
BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023

KATEGORI SATKER PAGU BESAR

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,



Ditandatangani secara elektronik
TRI ANANTO PUTRO





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-60/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEPADA

*Lapas Kelas II B Banjarbaru
(684001)*

SEBAGAI

TERBAIK KETIGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA TAHUN ANGGARAN 2023

KATEGORI SATKER PAGU BESAR

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,



Ditandatangani secara elektronik
TRI ANANTO PUTRO



REFORMASI
HUKUM



learning
KEMERDEKAAN



ALWAYS THE BEST



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : KEP-64/KPN.1901/2024

DIBERIKAN KEPADA

*Lapas Kelas II B Banjarbaru
(684001)*

SEBAGAI

TERBAIK PERTAMA
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

BANJARMASIN, 6 FEBRUARI 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN
NEGARA TIPE A1 BANJARMASIN,



Ditandatangani secara elektronik
TRI ANANTO PUTRO

